

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
Nomor SPM : 37.00/03.0/000315/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 Tanggal : 21 Desember 2023 SKPD : MAJELIS RAKYAT PAPUA		37.00/04.0/000286/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 Dari : BUD Tahun Anggaran : 2023	
Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp126.000.000 (terbilang: seratus dua puluh enam juta rupiah)			
Kepada : TERLAMPIR NPWP : 405253931954000 No. Rekening Bank : 0000000000 Bank Penerima : Bank Papua Keperluan Untuk : PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER 2023 A.N. WINARNI S.Sos. DKK PADA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH SESUAI PERMINTAAN TERLAMPIR (OTSUS BG 1%) Pagu Anggaran : Rp13.986.791.132 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus			
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	Rp126.000.000
2	9.02.02.3.01.06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Rp126.000.000
3	5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa Tenaga Administrasi	Rp126.000.000
Jumlah			Rp126.000.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah		0	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp126.000.000	
Jumlah Potongan		Rp0	
Jumlah Netto		Rp126.000.000	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp126.000.000	
Uang Sejumlah: seratus dua puluh enam juta rupiah			
			
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MANAJEMEN KELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kantor, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire - Papua Tengah 98811

OTSUS

MRP
: 126.000.000

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

Honorarium/Penghasilan lainnya, Lembur,
dan Biaya Perjalanan Dinas

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
- ☐ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☐ SK Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan/Penetapan Jabatan (pada awal pencairan);
- ☒ Daftar Penerimaan Honorarium;
- ☐ Daftar Potongan & E-biling PPh 21 (apabila ada);
- ☐ Surat Tugas/Surat Perintah Tugas;
- ☐ Surat Perintah Lembur;
- ☐ Daftar Pembayaran Lembur;
- ☐ Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- ☐ Visum SPPD;
- ☐ Bukti Tiket, boarding pass Pesawat dan Hotel;
- ☐ Kwitansi Bermaterai Penerima SPPD;
- ☒ Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- ☒ Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli.

Yang memverifikasi

NIP.

Nabire, 29 des 2023
Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005

No Revisi Bank Saluran ke SPM ✓

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

Jl. Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nabire 21 Desember 2023

Nomor : 900/704/SET/MRP/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Pengantar SPM LS

Kepada
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Provinsi Papua Tengah

di
NABIRE

Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-LS untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Keuangan (Bagian Keuangan) Sub Keg. Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan (OTSUS BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima (Pihak Ketiga)	Jumlah yang diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	21 Desember 2023	37.00/03.0/000315/ LS/9.03.0.00.0.00.2 2.0000/P.03/12/2023	TERLAMPIR	Rp.126.000.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

SEKRETARIS MRP
PROVINSI PAPUA TENGAH
SET-MRP
DANIEL MAIPON, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760423 199612 1 001

Dokumen Checklist/ Penelitian Kelengkapan SPM-LS
ST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

- ☐ Pengadaan Barang dan Jasa
- ☐ Ringkasan SPP-LS;
- ☐ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- ☐ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☐ Pengantar SPM-LS;
- ☐ SPM-LS;
- ☐ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- ☐ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☐ Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
- ☐ Berita Acara hasil pelelangan ;
- ☐ RAB;
- ☐ Faktu Barang ;
- ☐ Faktur Tagihan;
- ☐ Dokumentasi Barang ;
- ☐ Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- ☐ Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- ☐ Surat Permohonan Pembayaran;
- ☐ Berita Acara Pembayaran;
- ☐ Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- ☐ Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- ☐ Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- ☐ Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- ☐ Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- ☐ Referensi bank;
- ☐ Surat Jaminan bank;
- ☐ Fotocopy rekening giro bank;
- ☐ Fotocopy NPWP/PKP;

klasifikasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang
dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
LLING PPh dan PPN;

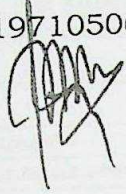
E-faktur pajak;

☐ Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos
Tanggal : 21 Desember 2023
NIP : 197105062003122008
Tanda Tangan : 

PERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

No. SPM: 37.00/03.0/000315/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

KEMUMUDAHAN DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

bitkan SP2D kepada:

: MAJELIS RAKYAT PAPUA
: TERLAMPIR

ahara /
hak Ketiga *)
No. Rekening Bank : 0000000000
Nama Bank : Bank Papua
NPWP : 405253931954000
Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023
Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Untuk Keperluan:
PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMISTRASI KEUANGAN PERIODE BULAN JULI S/D
DESEMBER 2023 A.N. WINARNI S.Sos. DKK PADA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT
PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH SESUAI PERMINTAAN TERLAMPIR (OTSUS BG
1%)

Pembebanan pada kode kegiatan

KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI
SPD - 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023		
9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	Rp126.000.000
9.02.02.3.01.06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Rp126.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp126.000.000
Jumlah		Rp126.000.000

Jumlah SPP yang Diminta:

(terbilang: seratus dua puluh enam juta rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP

37.00/02.0/000292/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

Rp126.000.000

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah
Jumlah			Rp0

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

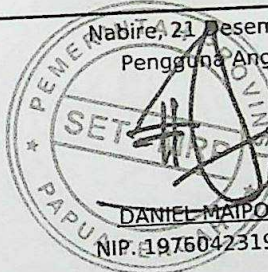
SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp126.000.000
Jumlah Potongan	Rp0
Jumlah Netto	Rp126.000.000
Jumlah yang Dibayarkan	Rp126.000.000

Uang sejumlah: (seratus dua puluh enam juta rupiah)



Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) coret yang tidak perlu

Pemerintah Provinsi Papua Tengah
MAJELIS RAKYAT PAPUA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000315/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Hubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000315/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp126.000.000 (terbilang seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

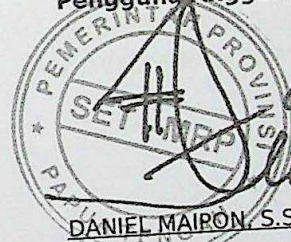
1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



DANIEL MAIRON, S.STP

NIP. 197604231996121001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : MATILDA MOSE. S.Sos
NIP : 197105062003122008
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000292/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023
PPK SKPD



MATILDA MOSE. S.Sos
NIP. 197105062003122008

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

nomor: 37.00/02.0/000292/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000292/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp126.000.000 (terbilang seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

PROVINSI PAPUA TENGAH
PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 00/02.0/000292/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

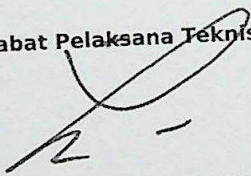
	Nama Sub Kegiatan	:	MAJELIS RAKYAT PAPUA
	Pengguna Anggaran	:	terlampir
	Nama PPTK	:	DANIEL MAIPON, S.STP
	Nama Bendahara Pengeluaran	:	OCTOFIANUS KARUBABA, S.Sos
		:	MARYAM NGANGUN
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	405253931954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000212
9.	Untuk Keperluan	:	PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMISTRASI KEUANGAN PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER 2023 A.N. WINARNI S.Sos. DKK PADA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH SESUAI PERMINTAAN TERLAMPIR (OTSUS BG 1%)
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023
		:	Sebesar: Rp126.000.000 (terbilang: seratus dua puluh enam juta rupiah)

Uraian

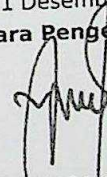
No		
I	SPD	
	Tanggal : 31-10-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023
		Rp17.467.781.184
II	SP2D Sebelumnya	
	Tanggal : -	Nomor : -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


OCTOFIANUS KARUBABA, S.Sos
 NIP. 197910232015031001

Nabire, 21 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran


MARYAM NGANGUN
 NIP. 197708042008012025



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran


PROVINSI PAPUA TENGAH
DURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 1.00/02.0/000292/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023
 Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

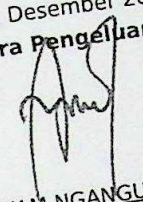
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
37.00/01.0/000011/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023		
01 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP		
01.06 Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp126.000.000
TOTAL : Rp126.000.000		

ng: seratus dua puluh enam juta rupiah.

Mengetahui Menyetujui,
 Pengguna Anggaran


 DANIEL MAIPON, S.STP
 NIP. 197604231996121001

Nabire, 21 Desember 2023
 Bendahara Pengeluaran


 MARYAM NGANGUN
 NIP. 197708042008012025



PEMERINTAH PROPINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

TAR : PEMBAYAN JASA TENAGA ADMISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA , PROPINSI PAPUA TENGAH

N : JULI S.D DESEMBER 2023

NAMA NIP	BIDANG TUGAS	JUMAH HONOR/ BULAN (RP)	JUMLAH BULAN	TOTAL NILAI	TANDA TANGAN	REKENING
2	3	4	5	6	9	10
WINARNI S.Sos.	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6	18.000.000	1	90002020
CRIS MARVIN SIHASALE, S.IP.	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6	18.000.000	2	90002023
FRITZ FREDERICH RARU, ST.	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6	18.000.000	3	90002070
JUAN KARLY MATHEUS, ST.	Staf Adm. Humas	3.000.000	6	18.000.000	4	90702010
JOHANES TAMA MARAN	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6	18.000.000	5	900020113
ORPA MANUARON	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6	18.000.000	6	9000202066
FERDINANDA LIDYA F.R.	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6	18.000.000	7	9000205022
		21.000.000		126.000.000		

Mengetahui
Sekretaris Majelis Rakyat Papua
Propinsi Papua Tengah

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire,

2023

Bendahara

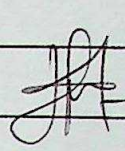
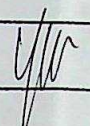
MARYAM NGANGUN
NIP. 19770804 200801 2 025

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Undang-Undang...../2

**DAFTAR PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

BULAN : JULI s/d DESEMBER 2023

NAMA	BIDANG TUGAS	BESAR HONOR per BULAN	JUMLAH BULAN	TOTAL NILAI	TANDA TANGAN	
2	3	4	5	6	7	
arni, S.Sos.	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6 Bulan	18.000.000	1.	
Marvin Sihasale, S.IP	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6 Bulan	18.000.000		2. 
Frederich Raru, ST	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6 Bulan	18.000.000	3.	
Karly Matheus, ST	Staf Adm. Humas	3.000.000	6 Bulan	18.000.000		4.
is Tama Maran	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6 Bulan	18.000.000	5. 	
Manuaron	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6 Bulan	18.000.000		6.
inanda Lidya F.R.	Staf Adm. Keuangan	3.000.000	6 Bulan	18.000.000	7.	
JUMLAH				126.000.000		

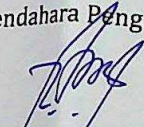
Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 18 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran


MARYAM NGANGUN
NIP. 19770804 200801 2 025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang/2

Pemerintah Provinsi Papua Tengah
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

Jl. Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, maka dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan Tugas Pembantuan di bidang tertentu;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang / 2

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33). Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak diatas tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
2. Tenaga Kontrak tersebut tidak menuntut fasilitas apapun dari Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah selama menjadi Tenaga Kontrak;
3. Tenaga Kontrak dapat diberhentikan secara sepihak oleh Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah apabila melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran etika dan sopan santun serta indisipliner;
4. Tenaga Kontrak diberikan Upah Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 01 Juli 2023, dan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nabire

Pada tanggal : 24 Juli 2023

SEKRETARIS
MAJELIS RAKYAT PAPUA

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001



KEPUTUSAN SKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR : 814/07/SET.MRP-PTT/2023
TANGGAL : 24 JULI 2023

DAFTAR TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS
1	WINARNI, S. Sos	STRATA 1 (S-1)	STAF ADM. KEUANGAN
2	CHRIS MARVIN SIHASALE, S.IP	STRATA 1 (S-1)	STAF ADM. KEUANGAN
3	FRITZ FREDERICH RARU, ST	STRATA 1 (S-1)	STAF ADM. PERSIDANGAN
4	JUAN KARLY MATHEUS, ST	STRATA 1 (S-1)	STAF ADM. HUMAS
5	JOHANES TAMA MARAN	SMA	STAF ADM. KEUANGAN
6	ORPA MANUARON	SMA	STAF ADM. KEUANGAN
7	FERDINANDA LIDYA F.R	SMA	STAF ADM. KEUANGAN
8.	G. JEMRY YAKOBUS B.	SMA	SOPIR SEKRETARIS MRP

SEKRETARIS MRP
PROVINSI PAPUA TENGAH


DANIEL MAIPON, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760423 199612 1 001